

Judul : ICW Beber Penyebab DPR Malas LHKPN
Tanggal : Rabu, 16 Januari 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

ICW Beber Penyebab DPR Malas LHKPN

JAKARTA-Empat faktor ditengarai sebagai penyebab para anggota DPR RI malas dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018. Hal itu dilayangkan Indonesia Corruption Watch dalam menindaklanjuti rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti ICW, Almas Sjafrina menyebutkan, alasan pertama yakni, rendahnya komitmen anggota dewan untuk menjadi penyelenggara negara yang jujur dan transparan. "Laporan KPK soal kemalasan DPR melaporkan LHKPN, ini menunjukkan ketidakpatuhan atau kemalasan anggota DPR untuk melapor," ujarnya saat dihubungi, Selasa (15/1).

Kesibukan dan kelalaian, sambung Almas, dinilai tak bisa menjadi alasan. Pasalnya, anggota DPR periode 2014-2019 sudah empat tahun menjabat. Alasan kedua, yaitu tidak bekerjanya partai politik dalam mengawasi kadernya di DPR.

Almas menuturkan, anggota DPR dicalonkan oleh partai politik pada pemilu legislatif, sehingga sudah seharusnya partai mengawasi dan memastikan kadernya menjadi penyelenggara negara yang baik dan patuh

terhadap undang-undang. "Kami melihat parpol tidak mengingatkan kadernya di DPR untuk menjadi kader sekaligus anggota DPR yang baik dan penyelenggara negara yang bersih," imbuh dia.

Alasan ketiga, lanjutnya, yaitu lemahnya sanksi yang dijatuhkan apabila kewajiban melapor LHKPN dilanggar. Perlu diatur sanksi yang dapat memaksa hingga membuat penyelenggara negara jera jika tak melapor LHKPN. "Seperti pengumuman nama yang bersangkutan kepada publik, penundaan pemberian tunjangan atau gaji, penundaan naik jabatan, larangan menduduki jabatan strategis atau pimpinan, denda hingga pencopotan dari jabatan," papar Almas.

Adapun penyebab terakhir, adalah tidak terintegrasinya kewajiban melapor LHKPN dengan undang-undang terkait lainnya. Salah satunya, UU Pemilu Legislatif. Almas menuturkan, pada Pasal 5 UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, LHKPN tak hanya wajib dilaporkan setelah penyelenggara negara yang bersangkutan menjabat, tapi juga sebelum menjabat.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengata-

kan, ada pemikiran tertentu dari anggota DPR terkait pembuatan LHKPN. Pemikiran ini diduga menjadi penyebab sedikitnya anggota DPR yang membuat LHKPN pada 2018.

"Menurut saya di DPR itu mungkin saja masih ada pemikiran kewajibannya hanya di awal dan akhir jabatan saja," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/1).

Selain itu, lanjutnya, mungkin saja anggota DPR merasa tidak ada perubahan aset dari tahun sebelumnya. Namun, Bamsoet sapaan akrab Bambang setuju bahwa LHKPN tetap harus dilaporkan setiap tahun. Dia akan mengingatkan para anggota DPR untuk membuat laporannya. "Tugas kita adalah mengingatkan kepada kawan-kawan untuk memperbaiki laporan. Termasuk kepada anggota yang merasa tidak ada perubahan dalam asetnya," kata dia.

Bamsoet mengingatkan, presentase pembuatan LHKPN DPR sempat sangat bagus pada 2017. Ketika itu hanya beberapa orang saja yang belum membuat laporan harta kekayaan.

Sebelumnya, DPR RI menjadi lembaga yang paling malas dalam penyampaian Laporan-

